

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Penentuan Sample Negara Anggota Uni Eropa**

Penulis membutuhkan sample dalam proses pengerjaan penelitian ini. Sample yang hendak digunakan berdasarkan negara-negara yang mempunyai kekuatan (baik secara politik ataupun ekonomi) dan pengaruh, serta menjadi sesuatu yang pantas untuk dipertimbangkan pada sektor pertanian di regional UE. Tentu saja, penentuan sample tersebut berkaitan erat dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang berhubungan dengan pertanian UE dan CAP.

Penentuan negara-negara yang dijadikan sample tersebut didasarkan atas tiga kategori, yaitu:

1. negara penerima bantuan keuangan CAP terbesar,
2. negara kontributor anggaran UE terbesar,
3. negara pemilik sektor pertanian terbesar.

Negara sebagai penerima bantuan keuangan terbesar sangat terlihat jelas kepentingannya dalam CAP. Hal ini memungkinkan dengan berbagai macam cara, negara tersebut akan mempertahankan kebijakan pertanian UE untuk tidak diubah dalam waktu dekat ini. Hal ini berkaitan apabila mekanisme CAP diubah, maka perubahan tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi pertanian negara tersebut dari sisi bantuan finansial dan bantuan teknik. Dengan demikian, kategori ini dapat dijadikan sebagai satu indikator untuk menentukan negara mana saja yang berperan di dalamnya.

Kedua, negara penyumbang terbesar juga mempunyai kepentingan yang besar terhadap CAP. Dengan anggaran yang diberikan oleh negara tersebut, sudah tentu negara itu tidak menginginkan kontribusi finansial yang diberikan kepada UE tidak bermanfaat bagi negaranya. Dengan kata lain, negara yang berada di dalam kategori kedua ini, akan memberikan pengaruhnya di dalam UE agar tidak merasa dirugikan. Ketiga, negara-negara yang memiliki sektor pertanian yang besar patut dijadikan kategori. Hal ini karena, terdapat banyak masyarakat petani

di negara tersebut yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan bantuan dari CAP, walaupun negara tersebut tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar di UE. Disamping itu, dengan besarnya peran pertanian di UE, negara-negara yang memiliki aset pertanian terbesar tersebut yang akan memberikan kontribusi pertanian dan perekonomian yang besar bagi UE.

Begitu banyak negara anggota UE hingga tahun 2007, yaitu 27 negara anggota. Hal ini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menjadikan seluruh negara tersebut sebagai subjek dari penelitian ini agar dapat mengidentifikasi kepentingan-kepentingan petani lokal di setiap negara. Tetapi, melalui pengkategorisasian ini, akan dapat mempermudah untuk menentukan sample negara-negara yang dijadikan contoh sebagai bahan kajian. Penulis menggunakan 3 (tiga) negara dari setiap kategori, sehingga mendapatkan 9 (sembilan) negara yang dijadikan sample pada tesis ini karena pengaruh dan pertimbangan ekonomi yang besar di UE. Kesembilan negara tersebut dapat merepresentasikan kepentingan domestik yang akan diharmonisasikan pada level UE.

Kategorisasi yang dipilih berdasarkan keterkaitan ketiga kategori tersebut dalam menentukan sikap UE untuk memposisikan diri terhadap isu pertanian. Negara-negara yang berada pada posisi teratas disetiap kategori menjadi bahan pertimbangan UE untuk menentukan kebijakan pada sektor pertanian, yang kemudian dijadikan kepentingan bersama. Negara-negara tersebut adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam keputusan di tingkat UE.

Berikut ini adalah negara-negara anggota UE (total 27 negara) yang masuk ke dalam masing-masing kategori:

No	Negara Penerima Bantuan Keuangan CAP Terbesar	Negara Kontributor Anggaran UE Terbesar	Negara Pemilik Sektor Pertanian Terbesar
1	Perancis	Jerman	Rumania
2	Spanyol	Inggris	Polandia
3	Jerman	Italia	Italia
4	Italia	Belanda	Spanyol
5	Inggris	Perancis	Yunani
6	Yunani	Swedia	Hungaria
7	Irlandia	Austria	Perancis
8	Austria	Denmark	Bulgaria
9	Belgia	Finlandia	Jerman

Sumber: Disesuaikan kembali dari berbagai sumber, yaitu:

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00001>;

BBCNews (2009). 'How the Money is Spent by Country: Who Pays What', 14 November 2009, [http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/europe/04/money/html/who\\_pays\\_what.stm](http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/europe/04/money/html/who_pays_what.stm);

BBCNews (2009). 'How the Money is Spent by Country: Cash Flow', <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/europe/04/money/html/agriculture.stm>

Tabel di bawah ini menunjukkan negara-negara yang telah menjadi anggota UE pada periode 2001-2005 dipilih sebagai sample dalam penelitian.

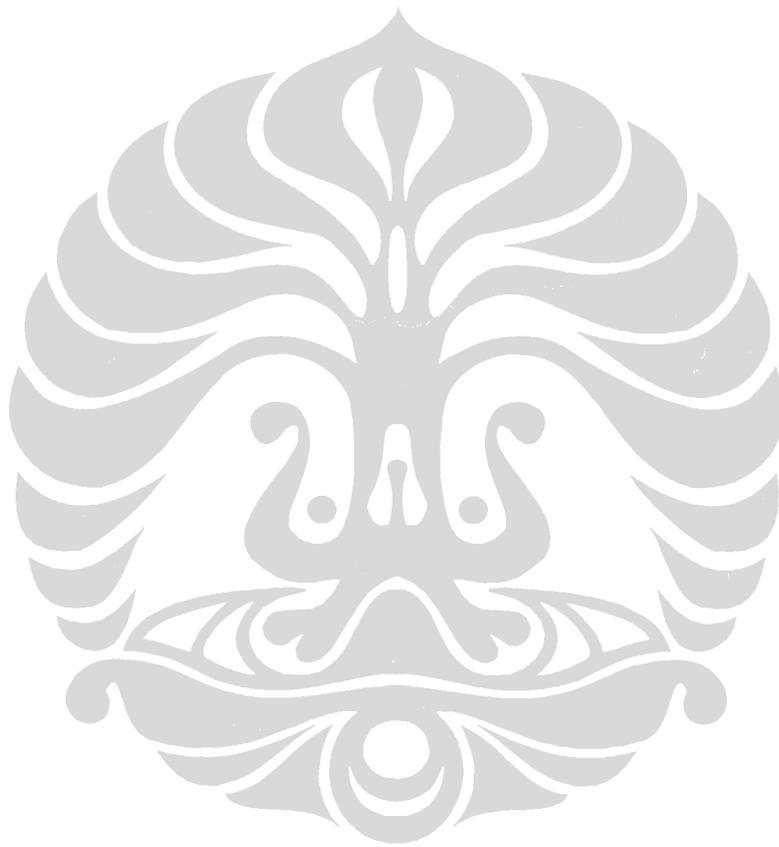
Negara	Negara Penerima Bantuan Keuangan CAP Terbesar	Negara Kontributor Anggaran UE Terbesar	Negara Pemilik Sektor Pertanian Terbesar
<b>Belanda</b>	Tidak	Ya (4)	Tidak
<b>Inggris</b>	Ya (5)	Ya (2)	Tidak
<b>Italia</b>	Ya (4)	Ya (3)	Ya (3)
<b>Jerman</b>	Ya (3)	Ya (1)	Ya (9)
<b>Perancis</b>	Ya (1)	Ya (5)	Ya (7)
<b>Potugal</b>	Tidak	Tidak	Ya (10)
<b>Spanyol</b>	Ya (2)	Tidak	Ya (4)
<b>Swedia</b>	Tidak	Ya (5)	Tidak
<b>Yunani</b>	Ya (6)	Tidak	Ya (5)

\* Negara yang berada pada urutan sepuluh besar di setiap kategori

\*\* ( ) menunjukkan peringkat di setiap kategori

Mengacu kepada tabel di atas, menunjukkan suatu kategorisasi yang dapat dijadikan suatu acuan untuk menentukan sample negara. Negara-negara yang telah dipilih tersebut, telah menjadi keanggotaan UE pada kurun waktu 2001-2005. Melalui negara-negara tersebut kemudian akan diidentifikasi kepentingan-

kepentingan konstituensi domestiknya, yaitu kelompok petani, yang mempunyai pengaruh dalam memformulasikan kebijakan negara. Berawal dari kepentingan konstituensi domestik tersebut, yang kemudian menjadi kepentingan bersama UE setelah melewati konsolidasi kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Kesembilan negara tersebut (berdasarkan abjad) adalah Belanda, Inggris, Italia, Jerman, Perancis, Portugal, Rumania, Spanyol, Swedia dan Yunani.



**Lampiran 2**

Bobot suara negara-negara anggota UE:

<b>Country</b>	<b>Number</b>
France, Germany, Italy and the United Kingdom	29
Poland and Spain	27
Romania	14
Netherlands	13
Belgium, Czech Republic, Greece, Hungary and Portugal	12
Austria, Bulgaria, Sweden	10
Denmark, Finland, Ireland, Lithuania, and Slovakia	7
Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg and Slovenia	4
Malta	3
<b>Total</b>	<b>345</b>

Sumber: European Communities. (2007). *How the European Union Works: Your guide to the EU institutions*. Belgium: European Commission.



### **Lampiran 3**

Pencapaian kesepakatan adalah tanggung jawab dari *DSB* (*Dispute Settlement Body*) pada *General Council*, yang terdiri dari keseluruhan anggota WTO. *DSB* memiliki otoritas tunggal untuk membentuk suatu panel dari ahli-ahli yang akan membahas suatu kasus, dan untuk menyetujui atau menolak hasil persetujuan. Mereka juga mengawasi pelaksanaan dari aturan-aturan dan rekomendasi, serta memiliki kuasa untuk memberikan peringatan bagi suatu negara yang tidak mengikuti aturan atau hasil kesepakatan.

Tahap pertama adalah konsultasi (hingga 60 hari). Sebelum pelaksanaan tahap pertama, negara-negara yang masih belum mencapai kesepakatan harus bertemu satu sama lain terlebih dahulu membicarakan kemungkinan untuk mengatasi perbedaan secara internal. Bila itu gagal, mereka dapat meminta Dirjen WTO untuk menjadi mediator ataupun membantu dengan suatu cara.

Tahap kedua adalah Panel (pembentukan panel hingga 45 hari, serta tambahan 6 bulan bagi panel untuk membuat kesimpulan). Apabila konsultasi gagal, negara yang berkeberatan dapat memohon pembentukan suatu panel. Negara yang dikeluhkan dapat menahan pembentukan panel tersebut selama satu kali, namun ketika *DSB* bertemu untuk kedua kalinya, persetujuan pembentukan panel tersebut tidak dapat ditahan untuk kedua kalinya (kecuali dikeluarkan *consensus* untuk menolak pembentukan panel). Seyogianya, panel bertugas untuk membantu *DSB* dalam membuat peraturan atau rekomendasi. Namun dikarenakan Laporan Akhir Panel hanya dapat ditolak dengan *consensus* dari *DSB*, keputusan tersebut sulit untuk di-*overturn*. Hasil keputusan panel harus didasarkan pada persetujuan yang telah dikemukakan. Laporan Akhir Panel secara normal seharusnya diberikan kepada kelompok yang berkepentingan untuk disetujui dalam kurun waktu 6 bulan. Dalam kasus-kasus tertentu, termasuk yang berkaitan dengan benda atau komoditi tertentu, *deadline* dapat dikurangi hingga 3 bulan.

Persetujuan tersebut dapat digambarkan dalam detail proses panel tersebut. Tahap-tahap utama yakni:

- Sebelum pembahasan pertama: masing-masing dari pihak yang ingin mencapai kesepakatan harus menyajikan kasus mereka kepada panel dalam paparan tulisan.
- Pembahasan pertama: kasus antara negara yang berkebaratan dan negara yang dikeluhkan: kedua belah pihak negara tersebut, beserta negara-negara lain yang telah menyatakan bahwa mereka tertarik atau terkait dengan pencapaian kesepakatan tersebut melakukan pembahasan pertama mereka dengan panel.
- Penolakan: negara-negara tersebut harus mengajukan penolakan secara tertulis dan memaparkan argumen mereka pada pertemuan kedua dengan panel.
- Ahli: apabila salah satu pihak mengajukan pengujian secara teknik, panel dapat berkonsultasi dengan ahli ataupun meminta kelompok pembahasan para ahli hingga menghasilkan laporan *advisory*.
- Draft pertama: panel memberikan laporan *advisory* bagian deskriptif (faktual dan argumentasi) kepada kedua belah pihak, untuk diberi tanggapan dalam 2 minggu. Laporan tersebut tidak termasuk temuan-temuan dan kesimpulan.
- Laporan interim: panel kemudian memberikan laporan interim, termasuk data temuan dan kesimpulan kepada kedua belah pihak dengan permintaan tanggapan dalam 1 minggu.
- Pengkajian: periode pengkajian tidak melebihi waktu 2 minggu. Selama periode tersebut, panel dapat mengadakan pertemuan tambahan dengan dua pihak itu.
- Laporan akhir: laporan akhir akan diberikan kepada kedua belah pihak negara 3 minggu kemudian, dan juga disirkulasikan kepada seluruh anggota WTO. Apabila panel memutuskan bahwa kesepakatan terkait perdagangan tersebut berlawanan dengan persetujuan atau obligasi WTO, maka panel merekomendasikan bahwa hasil kesepakatan tersebut harus disesuaikan dengan aturan WTO. Panel dapat memberikan saran bagi pelaksanaan untuk hal itu.
- Laporan tersebut menjadi suatu aturan: laporan tersebut menjadi kebijakan atau rekomendasi dari *DSB* dalam 60 hari kecuali ada konsensus yang menolaknya. Kedua belah pihak dapat meninjau ulang laporan tersebut.

